

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Agus Riswanto, 2016, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, Thafa Media: Yogyakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Andrew Vincent dalam Isharyanto, 2016, *Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945*, Penerbit WR: Yogyakarta.

Bintang R. Siragih, 1988, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama: Jakarta.

BN Marbun, 2006, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.

C.F Strong, 2015, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Nusa Media: Bandung

Charles Simabura, 2011, *Parlemen Indonesia Landasan Sejarah dan Sistemnya*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Dahlan Thaib, 2000, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Kedua, Liberty: Yogyakarta.

Feri Amsari, 2020, *Pembaruan Partai Politik di Indonesia: Demokrasi Internal Partai Politik*, Malang: Intrans Publishing.

----- dkk, 2020, *Pembaruan Partai Politik di Indonesia*, Intrans Publishing.

Giovanni Sartori, 2005, *Parties and Party Systems, a Framework for Analysis*, ECPR Press: Colchester-UK.

I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup: Jakarta.

Jack C. Plano, dkk., 1985, *Kamus Analisis Politik*, Rajawali: Jakarta.

Jean J. Rosseau, 1986, *Kontrak Sosial*, Penerbit Erlangga: Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI: Jakarta.

----- 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP: Jakarta.

----- 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

----- 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing: Malang.

Khairul Fahmi, 2011, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Rajawali Pers: Jakarta.

Lili Romli, 2021, *Partai Politik: Dinamika dan Problematik Pelembagaan di Indonesia*, Intrans Publishing: Malang.

Miriam Budiardjo, 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. Ke-27, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

Muhadam Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*.

R. Kranenburg, 1989, *Ilmu Negara Umum*, cetakan kesebelas, Pradnya Paramita: Jakarta.

Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT Grasindo: Jakarta.



- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta.
- Soewoto Mulyosudarmo, 2004, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN dan In-Trans: Malang.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta: Bandung.
- Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo: Jakarta.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Raja Wali Pres, Ed. 1, Cet.1: Jakarta.
- Widodo, 2017, *Metode Penelitian Populer dan Praktis*, Raja Grafindo: Jakarta.
- Yudhia Perdana S, 2021, *Politik Hukum: Pengaturan Pemberhentian Anggota Partai Politik dalam Jabatan sebagai Anggota DPR-RI*, Amerta Media: Pekanbaru.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Pollitik

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### **C. Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD

### **D. Jurnal**

Ananda B. Kusuma, "*Tentang Recall*", Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 4.

Anne Twomey, 2011, "*The Recall of Members of Parliament and Citizens' initiated Electins*", UNSW Law Journal 34, Nomor 1.

Hadi Subhan, 2006, "*Recall: Antara Hak Partai Politik Dan Hak Berpolitik Anggota Parpol*", Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 4.

----- 2006, "*Recall: Antara Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol*", Jurnal Konstitusi, Volume 3 Nomor 4.

Muh. Kausar, 2015, "*Otoritas Ilmuan Sosial Politik, Dalam Dinamika Politik*",  
Jurnal Politics Magister Ilmu Politik Universitas Hanasanuddin, Volume  
1, Nomor 2.

Muhammad Irfan dan Trian Marfiansyah, 2021, "*Recall referendum sebagai  
Alternatif Proses Penggantian Antarwaktu Lembaga Legislatif di  
Indonesia*", Jurnal Volkgeist, Volume 4 Nomor 1.

Rida Farida, 2016, "*Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR  
dan Implikasinya dalam Konsep Perwakilan Rakyat*", Jurnal Cita Hukum,  
Volume 1, Nomor 2.

#### **E. Website**

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat. Diakses melalui  
<https://demokrat.or.id.com/>.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra. Diakses melalui  
<https://gerindra.id.com/>.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera. Diakses  
melalui <https://pks.id/file/ad-art-pks.com/>.

